

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah di Indonesia resmi dilaksanakan setelah Reformasi Tahun 1998 berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah merealisasikan konsep otonomi daerah sebagai wujud dari desentralisasi kekuasaan Pemerintah demi kesejahteraan rakyat sesuai amanah Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

Kebijakan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis bangsa Indonesia dalam rangka memperkuat perekonomian daerah untuk menghadapi era globalisasi ekonomi. Reformasi anggaran, khususnya reformasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu perubahan dalam manajemen keuangan daerah yang merupakan konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Pemerintah Daerah (Sari, Kepramareni and Novitasari, 2017).

Tujuan otonomi daerah yaitu menciptakan kemandirian untuk secara optimal membangun daerah dan segala aktivitas pembangunan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik, serta penggunaan sumber keuangan yang dimiliki digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan daerah. Pemerintah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan publik dengan meningkatkan pelayanan publik agar menjadi lebih baik dan melakukan perbaikan diberbagai sektor yang potensial untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Fadli, Ethika and Rifa, 2015).

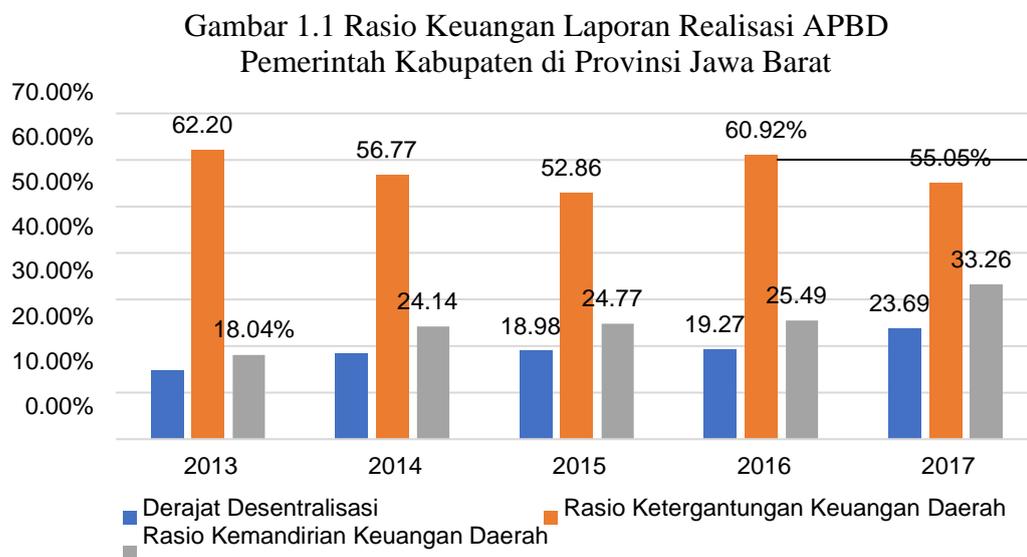
Sejalan dengan tujuan dari otonomi daerah, APBD disusun dengan maksud untuk menyesuaikan antara sumber daya daerah yang tersedia dan kebijakan

ekonomi makro guna mendorong kemandirian masing-masing daerah sehingga pemerintah daerah berupaya untuk mengoptimalkan penggalian terhadap PAD agar dapat mendanai aktifitas operasional pemerintah daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, dengan menggunakannya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan merupakan persiapan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran (Budianto and Alexander, 2016). Selain PAD, Dana Perimbangan merupakan komponen pendapatan daerah terbesar dalam struktur APBD. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan memiliki peran untuk memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Selain sebagai sumber informasi, Laporan keuangan Pemerintah Daerah juga memiliki fungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Wahyudi and Wulandari, 2017).

Terkait pentingnya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, akuntabel dan transparan, maka perlu diketahui sejauh mana keandalan Laporan Keuangan Daerah, salah satu caranya adalah dengan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Rasio tersebut terdiri dari derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Derajat desentralisasi merupakan perbandingan antara PAD dengan total Pendapatan Daerah, rasio ini menunjukkan seberapa tinggi tingkat kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Sedangkan rasio ketergantungan keuangan daerah merupakan perbandingan antara Pendapatan Transfer dengan total Pendapatan Daerah, rasio ini menunjukkan seberapa tinggi tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat atau Provinsi. Dan yang terakhir yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, dihitung dengan membandingkan PAD dengan Pendapatan Transfer Pusat dan Provinsi ditambah pinjaman daerah, rasio ini menunjukkan seberapa tinggi tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menerapkan prinsip transparansi atas Laporan Keuangan Daerahnya. Mengingat Jawa Barat sebagai provinsi penyangga dari Ibu Kota Indonesia dan merupakan daerah padat penduduk dengan banyak kepentingan di dalamnya. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian atas data yang berasal dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Berikut rasio keuangan terhadap APBD Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang tersaji dalam Gambar 1.1.



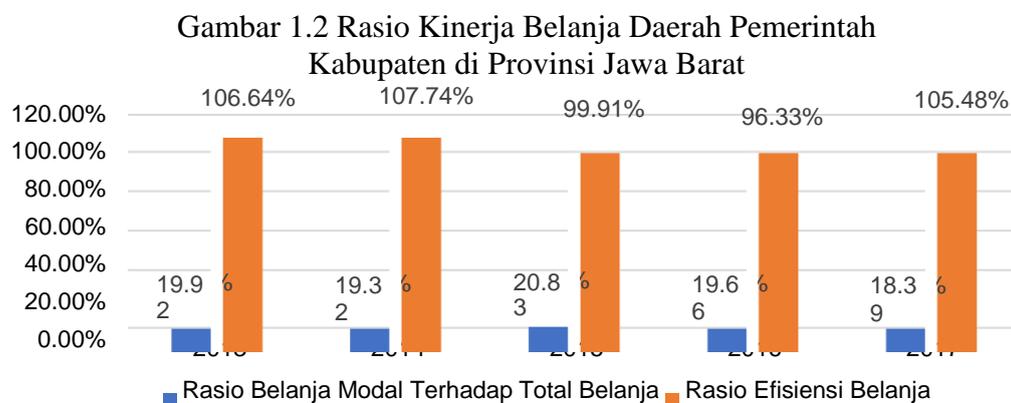
Sumber: Data diolah, 2019

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa distribusi desentralisasi Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Distribusi desentralisasi pada tahun 2013 sebesar 14,73%, pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sekitar 4% sehingga menjadi 18,49%, kemudian menjadi 18,98% pada tahun 2015, dan mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 sekitar 4% menjadi 23,69%. Meski tren yang ditunjukkan baik, namun kemampuan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dalam menggali sumber pendapatan asli daerahnya masih sangat perlu ditingkatkan lagi.

Rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun mengalami penurunan hampir di setiap tahunnya. Rasio ketergantungan keuangan daerah turun sekitar 5% dari tahun 2013 ke tahun 2014 menjadi 56,77%, namun dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 60,92%. Rasio ini mengalami penurunan lagi sekitar 6% pada tahun 2017 menjadi 55,05%. Meski tren yang ditunjukkan baik, namun tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi akan lebih baik jika lebih diminimalkan.

Rasio kemandirian keuangan daerah yang ditunjukkan dalam Gambar 1.1 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 sebesar 18,04%, pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sekitar 6% menjadi 24,14%, pada tahun 2015 dan 2016 yaitu sebesar 24,77% dan 25,49%, dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2017 yaitu sekitar 8% menjadi 33,26%. Meski tren yang ditunjukkan baik, namun kemandirian Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat masih sangat perlu ditingkatkan lagi.

Selain analisis rasio keuangan terhadap Laporan Realisasi APBD, kinerja Pemerintah Daerah juga dapat dinilai dari analisis kinerja belanja daerah. Peneliti menggunakan dua rasio dalam analisis kinerja belanja daerah yaitu, Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja dan Rasio Efisiensi Belanja. Berikut rasio untuk mengukur kinerja belanja daerah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang tersaji dalam Gambar 1.2.



Sumber: Data diolah, 2019

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja cenderung stabil selama 5 tahun. Pada tahun 2013 sebesar 19,92%, menurun di tahun 2014 menjadi 19,32%, pada tahun 2015 meningkat 1,51% menjadi 20,83%, dan penurunan terjadi lagi dari tahun 2016 ke tahun 2017 yaitu dari 19,66% menjadi 18,39%. Hal ini menunjukkan tidak adanya peningkatan yang besar terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Sementara, untuk Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat cenderung fluktuatif dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2013 sebesar 106,64%, pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu sekitar 8%, dari 107,74% menjadi 99,91%. Sedangkan dari tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sekitar 9%, yaitu dari 96,33% ke 105,48%. Meskipun menurunnya rasio efisiensi belanja merupakan tren yang baik, namun Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat masih perlu melakukan efisiensi terhadap belanja daerah.

Demi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan sistem otonomi daerah yang sedang dijalani Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat dituntut untuk dapat meningkatkan PAD. Selain PAD, sumber pendapatan daerah lainnya yang berupa Dana Perimbangan juga harus dikelola dengan tepat. Pendapatan yang diperoleh tersebut secara maksimal diharapkan mampu membiayai segala kebutuhan daerah berupa infrastruktur atau sarana prasarana dan kebutuhan daerah lain melalui alokasi belanja modal pada APBD. Alokasi belanja modal diadakan demi pemenuhan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana yang diharapkan dapat mendorong kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk meningkatkan fasilitas publik serta kualitas pelayanan publik. Hal ini dapat terwujud apabila pemerintah daerah mengubah komposisi belanjanya agar pemanfaatannya dapat lebih banyak diserap untuk hal-hal produktif, seperti melakukan pembangunan infrastruktur dan menambah program-program layanan publik. Pengelolaan pendapatan serta pengalokasian belanja dapat memengaruhi keberhasilan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2017”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2017?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2017?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2017?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian diatas yaitu:

1. Mengetahui pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2017.
2. Mengetahui pengaruh negatif Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2017.
3. Mengetahui pengaruh positif Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2017.

4. Mengetahui pengaruh positif PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2017

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan antara lain:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam menambah wawasan dan memperoleh pengetahuan peneliti berdasarkan hasil dari mencermati kejadian-kejadian yang nyata, lalu dipelajari melalui ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan khususnya dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk rakyat yang ingin mengetahui mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat.

3. Manfaat Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengambil kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat untuk dapat memaksimalkan penggunaan dari pendapatan daerah dan pengalokasian terhadap belanja modal.

4. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya bagi yang berminat untuk meneliti mengenai PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah.